

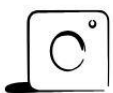


RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN
2025-2029

DPMPTSP
TULUNGAGUNG



dpmptsp_tulungagung



www.dpmptsp.tulungagung.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 dapat disusun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, sehingga terdapat keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan kebutuhan dan potensi daerah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Dengan ini demikian, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 ini menjadi pedoman / acuan dalam Rencana Kerja.

Adanya keterbatasan sumberdaya manusia maka penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 ini tidak luput dari kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga sangat dibutuhkan saran dan masukan yang berguna untuk penyempurnaan.

Semoga melalui Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029, ini diharapkan diperoleh kebersamaan persepsi dan langkah operasional kegiatan pengembangan investasi dan peluang usaha di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 19 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. TULUNGAGUNG



Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL1

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI.....4

DAFTAR TABEL.....6

DAFTAR GAMBAR.....7

BAB I PENDAHULUAN8

1.1 Latar Belakang.....9

1.2 Dasar Hukum.....9

1.3 Maksud dan Tujuan12

1.4 Sistematika Penulisan.....13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

DPMPTSP KAB TULUNGAGUNG14

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulungagung14

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tulungagung14

2.1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulungagung22

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulungagung.....23

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....26

2.1.5 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulungagung.....27

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tulungagung29

2.2.2 Isu Strategis Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulungagung.....30

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN33

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-202933

3.2 Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulungagung34

3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tulungagung.....35

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN38

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....41

BAB V PENUTUP57

LAMPIRAN.....59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung berdasarkan Golongan22
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung22

Tabel 2.1.3 Capaian SPM Perizinan Berusaha dan Non Perizinan24
Capaian Realisasi PMTB dan Realisasi Investasi25

Tabel 2.1.5 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung27

Tabel 2.2.2 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulungagung.....31

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung33

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung35

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung37

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu Indikatif41

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan50

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Porgram Prioritas Pembangunan Daerah
.....55

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung56

Tabel 5.5 Indikator Kinerja Kunci56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulungagung.....21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tulungagung adalah kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan letak geografis yang strategis guna mendukung perkembangan pembangunannya sendiri maupun kabupaten sekitarnya. Sehingga mempunyai potensi besar serta tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah sekitarnya. Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 5 (lima) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan manusia, ekonomi, sosial, infrastruktur dan aparatur atau birokrasi.

Landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi adalah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya landasan hukum perencanaan pembangunan daerah juga harus mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2024 atau 2025 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2025. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Penyusunan dokumen Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung 2025 – 2029 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Selain itu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk menyusun Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menyesuaikan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program beserta anggaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal, yaitu melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengevaluasi mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal

. Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen yang dibuat sebagai tuntutan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029, dengan demikian tujuan, sasaran dan strategis tetap mengacu pada arah kebijakan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029. Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel dan responsive terhadap aspirasi masyarakat daerahnya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 mencakup :

1. Tugas pokok dan fungsi
2. Tujuan dan sasaran OPD
3. Indikator dan target kinerja
4. Nomenklatur program dan kegiatan

1.2. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 ini, terdapat sejumlah peraturan yang berskala Nasional maupun lokal yang secara langsung terkait dengan penyusunan Renstra dan digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
19. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/11 8/013/2022 Penetapan Koordinator, Sub Koordinator dan Tugas Koordinator, Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029
21. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomo 53);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

1.3. Maksud dan Tujuan

- A. Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 adalah :
 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029 dapat tercapai;
 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
- B. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung adalah :
 1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
 2. Merencanakan program Penanaman Modal, dalam lingkungan yang semakin kompleks;
 3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;
 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
 5. Sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program ;
- 4.2 Uraian Kegiatan ;
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung serta diperjelas pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

Kedudukan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dinas;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
- f. Penyelenggaraan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penanaman modal.

Susunan Perangkat Daerah

Susunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 - Sub Koordinator Perencanaan;
 - Sub Koordinator Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Koordinator Penanaman Modal membawahi:
 - Sub Koordinator Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal
 - Sub Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan Penanaman Modal
 - Sub Koordinator Pengendalian Pelaporan Penanaman Modal
- d. Koordinator Pelayanan Penanaman Modal membawahi:
 - Sub Koordinator Pelayanan dan Penetapan Perizinan
 - Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Perizinan
 - Sub Koordinator Pengaduan dan Penertiban Perizinan
- e. Koordinator Layanan Data membawahi:
 - Sub Koordinator Pengolahan Data
 - Sub Koordinator Layanan Informasi

Adapun Tugas dan Fungsi dari masing – masing struktur di atas adalah :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan Pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan administrasi Dinas;
- Pelaksanaan pemberian izin di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan pengaduan layanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Pembinaan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang – bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;

- Pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan Dinas;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- Pemantauan dan evaluasi Dinas;
- Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang koordinator jabatan fungsional dan sub koordinator jabatan fungsional;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas masing – masing yang membawahi sekretariat antara lain :

1. Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas :

- a) Menyusun progam dan perencanaan Dinas ;
- b) Menyusun dan mengolah data statistik Dinas ;
- c) Menyusun bahan koordinasi dan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
- d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Dinas ;
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

2. Sub Koordinator Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan peñtausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- b) Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- d) Melaksanakantugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- b) Melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
- c) Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d) Menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e) Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat;
- f) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Koordinator Penanaman Modal mempunyai tugas:

- Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal;
- Melaksanakan perencanaan di bidang Penanaman Modal ;
- Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pengendalian Penanaman Modal ;
- Melaksanakan pembinaan teknis dan pengkajian iklim investasi dibidang Penanaman Modal ;
- Melaksanakan pengawasan dibidang Penanaman Modal;
- Melaksanakan promosi dan koordinasi dibidang Penanaman Modal;
- Menyusunbahan – bahan, penyiapan sarana dan publikasi promosi Penanaman Modal;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal;
- Menyusun peta potensi penanaman modal;
- Mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal dengan memberdayakan badan usaha;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban bidang Penanaman Modal;
- Mengoordinasikan Sub Koordinator Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal, Sub Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan Penanaman Modal, dan Sub Koordinator Pengendalian Pelaporan Penanaman Modal; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Tugas masing – masing yang membawahi Koordinator Penanaman Modal antara lain :

1. **Sub Koordinator Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal**, mempunyai tugas :

- a) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan perencanaan Penanaman Modal;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis promosi dan perencanaan Penanaman Modal;
- c) Menyusun norma, Standard dan prosedur pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal;

- d) Melaksanakan inventarisasi dan mengkaji solusi hambatan Penanaman Modal;
- e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan promosi penanaman modal baik dalam maupun luar negeri;
- f) Menyusun bahan publikasi promosi penanaman modal, antara lain melalui pameran investasi;
- g) Menyusun sarana promosi penanaman modal;
- h) Melaksanakan sosialisasi kebijakan penanaman modal;
- i) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator

2. Sub Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan dan Pemberdayaan Penanaman Modal (PM);
- b) Menyusun bahan kajian peta potensi investasi daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- c) Melakukan pengendalian dan pemberdayaan pelaksanaan Penanaman Modal;
- d) Melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan dan Pemberdayaan Penanaman Modal;
- e) Melaksanakan pembinaan Penanaman Modal dalam upaya meningkatkan daya saing;
- f) Menyusun rencana pengembangan Penanaman Modal antar daerah dan kerjasama Penanaman Modal;
- g) Memfasilitasi peningkatan kemitraan dengan pihak lain dibidang Penanaman Modal;
- h) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

3. Sub Koordinator Pengendalian Pelaporan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a) menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan Pelaporan PM;
- b) melaksanakan kebijakan teknis Pengendalian dan Pelaporan PM;
- c) Melaksanakan monitoring , pengawasan dan pengendalian PM;
- d) Melakukan inventarisasi dan verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan PM daerah;
- e) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ; dan
- f) melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Koordinator .

d. Koordinator Pelayanan Perizinan mempunyai tugas :

- Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pelayanan Perizinan;
- Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Perizinan;
- Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengaduan Perizinan;
- Pengolahan data pengaduan Perizinan;
- Pelaksanaan koordinasi hasil layanan pengaduan;

- Pelaksanaan koordinasi Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- Fasilitasi pelayanan Perizinan;
- Pelaksanaan pemberian izin atas rekomendasi dari instansi teknis sesuai dengan kewenangannya;
- Mengkoordinasikan Sub Koordinator Pelayanan dan Penetapan Perizinan, Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi dan Sub Koordinator Pengaduan dan Penetapan Perizinan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan Perizinan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tugas masing – masing yang membawahi Koordinator Layanan Data dan Informasi antara lain :

d.1. Sub Koordinator Pelayanan dan Penetapan Perizinan, mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan teknis pelayanan Perizinan;
- b) Melaksanakan koordinasi Pelayanan Perizinan;
- c) Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e) Melaksanakan pelayanan Perizinan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- f) Pemrosesan penyelesaian penerbitan dokumen Perizinan mencakup verifikasi, pelayanan Perizinan dan penerbitan izin;
- g) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas pelayanan dan penetapan Perizinan;
- h) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

d.2. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi Perizinan;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- c) Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Monitoring dan evaluasi Perizinan;
- d) Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja Monitoring dan Evaluasi;
- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi peraturan dan perundangan Pelayanan Perizinan;
- f) Melaksanakan program sosialisasi perundangan Pelayanan Perizinan;
- g) Memrosesan penyelesaian dokumen Perizinan mencakup validasi dan pemenuhan komitmen Perizinan;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perizinan yang telah terbit;
- i) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- j) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

d.3. Sub Koordinator Pengaduan dan Penertiban Perizinan, mempunyai tugas :

- a) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengaduan dan penertiban layanan;
- b) Melaksanakan kebijakan teknis pengaduan dan penertiban layanan;
- c) Melayani pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan Perizinan;
- d) Menyusun bahan koordinasi penyelesaian masalah pengaduan Perizinan;
- e) Melaksanakan tindak lanjut dan berita acara pengaduan Perizinan;
- f) Melaksanakan inventarisasi permasalahan Perizinan;
- g) Menyusun rencana koordinasi penertiban izin dan penyusunan berita acara penertiban izin dengan instansi terkait;
- h) Melaksanakan penertiban Perizinan yang tidak sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
- i) Menyusun laporan pengaduan, melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan Perizinan;
- j) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator

e. Koordinator Layanan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- Mengoordinasikan Perumusan kebijakan teknis Bidang Layanan Data dan Informasi;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Layanan Data dan Informasi;
- Melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan data dan informasi;
- Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan layanan data dan informasi;
- Melakukan proses pengolahan data dan informasi;
- Melaksanakan koordinasi hasil layanan data dan informasi;
- Melaksanakan sosialisasi data dan informasi;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bidang Layanan Data dan informasi;
- Mengkoordinasikan Sub Koordinator Pengolahan Data dan Sub Koordinator Layanan Informasi;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas masing – masing yang membawahi Koordinator Layanan Data dan Informasi antara lain :

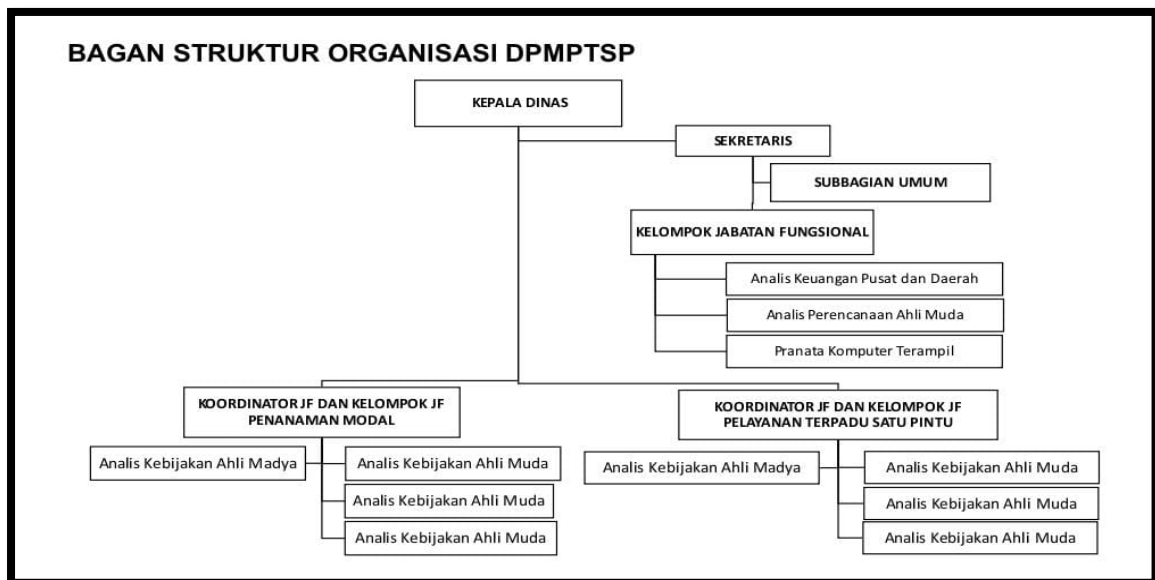
e.1. **Sub Koordinator Pengolahan Data**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis Pengolahan Data;
- c. Menyusun bahan analisa dan pemutakhiran data;
- d. Melakukan pengelolaan, analisa dan pemutakhiran data;
- e. Menyusun bahan visualisasi data;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

e.2. **Sub Koordinator Layanan Informasi**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Layanan Informasi;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis Layanan Informasi;
- c. Memberikan informasi terkait dengan layanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
- d. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis layanan informasi;
- f. Menyusun bahan koordinasi layanan informasi;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Tulungagung

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan Personil/Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebanyak 24 orang terdiri dari :

- Eselon II sebanyak 1 orang;
- Eselon III sebanyak 1 orang;
- Eselon IV sebanyak 8 orang;
- Staf sebanyak 14 orang terdiri dari
9 orang PNS, 5 orang P3K, dan 20 orang Jasa Kerja;
- Staf khusus Pembersih 7 orang, Sopir 1 orang, Tenaga Keamanan 9 orang dan pendamping OSS 3 orang.

Berikut ini digambarkan jumlah pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel.2.1 dan tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai DPMPTSP berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	I	-	0%
2.	II	5	21%
3.	III	10	41%
4.	IV	4	17%
5.	X	1	4%
6.	IX	4	17%
JUMLAH		24	100%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, 2025

Tabel 2.1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	SD	-	-
2	SLTP	-	
3	SLTA	5	21%
4	Diploma/D1/D3/D4	2	8%
5	S1	9	38%
6	S2	8	33%
JUMLAH		24	100%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung merupakan instansi teknis yang melayani Penanaman Modal dan Perizinan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi bupati yang dijabarkan ke dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM di bawah ini membidik dari Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam tahun berjalan. Meliputi Perizinan Berusaha dengan Risiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi dan PBUMKU. Non Perizinan meliputi Izin Penyelenggaraan Reklame, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan), Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan), Surat Terdaftar Penyelenggaraan Klinik Non Berusaha, Pengesahan Site Plan Perumahan dan MPP Digital (Sektor Kesehatan). Pada tabel menunjukkan perbedaan target dan realisasi, dapat dilihat juga pada Capaian Realisasi PMTB dan Realisasi Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan dengan manajemen kinerja yang baik membentuk sinergi kerja yang menunjang efektifitas organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung senantiasa melaksanakan program prioritas sebagai acuan Perangkat Daerah untuk merencanakan program serta kebutuhan pendanaan prioritas sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.

Hal ini dilakukan agar Capaian Kinerja Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari jenis dan jumlah pelayanan dasar yang terlayani sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.3 Capaian SPM Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PERIZINAN BERUSAHA								
1	Resiko Rendah	300	554	1387	928	658	1018	907
2	Resiko menengah Rendah	100	196	279	171	186	255	252
3	Resiko Menengah Tinggi	1	3	1	2	1	0	3
4	Resiko Tinggi	3	9	17	13	4	14	3
5	PB UMKU	1	4	0	3	1	3	16
NON PERIZINAN								
1	Izin Penyelenggaraan Reklame	25	29	82	50	32	82	47
2	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	8	9	42	39	16	22	28
3	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	3	4	4	12	6	29	6
4	Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan)	1	0	4	0	0	0	3
5	Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan)	0	0	0	0	0	0	0
6	Surat Terdaftar Penyelenggaraan Klinik Non Berusaha	0	0	0	0	0	0	0
7	Pengesahan Site Plan Perumahan	1	0	2	5	0	2	0
8	MPP Digital (Sektor Kesehatan)	40	98	85	119	99	117	143

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, 2025

Tabel 2.1.3 Capaian Realisasi PMTB dan Realisasi Investasi

NO	URAIAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi PMTB	-	-	-	-	-	7.228,08	7.290,97	7.672,78	8.053,79	8.488,02	-	-	-	-	-
2	Realisasi Investasi	-	300 M	350 M	400 M	500 M	-	494,251 M	571,241 M	580,048 M	544,004 M	-	165%	163%	145%	109%
NO	URAIAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan PMTB	-4,41 %	0,87%	5,24%	4,97%	5,03%	-4,79%	1,26%	5,24%	4,97%	5,39%	109%	145%	100%	100%	107%
2	Realisasi Penanaman Modal	-	300 M	350 M	400 M	500 M	-	494,251 M	571,241 M	580,048 M	544,004 M	-	165%	163%	145%	109%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terintegrasi. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP Tulungagung memiliki beberapa kelompok sasaran layanan yang menjadi penerima manfaat dari layanan yang diberikan;

A. Pelaku Usaha

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Usaha Besar
- Investor dalam dan luar negeri
- Perseorangan atau badan hukum yang mengajukan perizinan berusaha

B. Masyarakat Umum

- Warga yang membutuhkan layanan perizinan non-usaha (contoh: PBG, izin reklame, pkkpr, swalayan, izin lingkungan, dll)
- Masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik terkait perizinan dan investasi

C. Instansi/Lembaga Pemerintah

- Instansi vertikal atau dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan proses perizinan (misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PU, dll)

D. Calon Investor

- Baik lokal maupun asing yang ingin memperoleh informasi tentang peluang investasi di Tulungagung
- Mencari data potensi wilayah, fasilitas, dan insentif investasi

E. Aparatur Sipil Negara (ASN) Internal DPMPTSP

- Untuk pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pembinaan pegawai yang bertugas dalam pelayanan

2.1.5 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyediaan sarana dan prasarana bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung merupakan faktor pendukung utama agar dalam kinerja mampu bergerak dengan cepat dan tepat sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal dan mampu memberikan kepuasan kepada pemohon izin dalam lingkup penanaman modal maupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.5 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung**

No	JENIS	JUMLAH UNIT / BUAH	
1	TANAH	2	Unit
2	TANAH PERSIL	2	Unit
3	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	2	Unit
4	ALAT BESAR	2	Unit
5	ALAT BANTU	2	Unit
6	ELECTRIC GENERATING SET	2	Unit
7	ALAT ANGKUTAN	27	Unit
8	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	27	Unit
9	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7	Unit
10	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	20	Buah
11	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	324	Buah
12	ALAT KANTOR	63	Buah
13	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	1	Buah
14	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	14	Buah
15	ALAT KANTOR LAINNYA	48	Buah
16	ALAT RUMAH TANGGA	238	Buah
17	MEUBELAIR	175	Buah
18	ALAT PENDINGIN	25	Buah
19	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	32	Buah
20	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	6	Buah
21	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	23	Unit
22	MEJA KERJA PEJABAT	10	Buah
23	KURSI KERJA PEJABAT	9	Buah
24	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	4	Buah
25	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3	Buah
26	ALAT STUDIO	2	Buah
27	PERALATAN STUDIO AUDIO	1	Buah
28	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1	Buah
29	ALAT KOMUNIKASI	1	Buah
30	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	1	Buah
31	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	Buah
32	ALAT KEDOKTERAN	2	Buah

33	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	2	Buah
34	ALAT LABORATORIUM	2	Buah
35	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	2	Buah
36	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	2	Buah
37	KOMPUTER	122	Buah
38	KOMPUTER UNIT	56	Unit
39	KOMPUTER JARINGAN	1	Unit
40	PERSONAL KOMPUTER	55	Unit
41	PERALATAN KOMPUTER	66	Unit
42	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	66	Unit
43	PERALATAN OLAH RAGA	1	Unit
44	PERALATAN OLAH RAGA	1	Unit
45	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1	Unit
46	BANGUNAN GEDUNG	8	Unit
47	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8	Unit
48	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	5	Unit
49	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	3	Unit
50	JARINGAN	4	Unit
51	JARINGAN TELEPON	4	Unit
52	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	4	Unit
53	BAHAN PERPUSTAKAAN	2	Buah
54	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1	Buah
55	BUKU UMUM	1	Buah
56	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	Buah
57	AUDIO VISUAL	1	Buah
58	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	7	Buah
59	BARANG BERCORAK KESENIAN	7	Buah
60	LUKISAN	7	Buah
61	ASET TIDAK BERWUJUD	6	Buah
62	ASET TIDAK BERWUJUD	6	Buah
63	SOFTWARE	6	Buah

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, 2024

2.2. Permasalahan dan Isu Srategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tulungagung sejauh ini telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tulungagung selain melakukan koordinasi OPD lain juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan optimalisasi promosi untuk percepatan pencapaian realisasi investasi Kabupaten Tulungagung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tulungagung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terus-menerus melakukan inovasi dan evaluasi. Dengan direncanakannya program dan kegiatan, diharapkan akan berdampak pada kualitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung semakin meningkat baik melalui pelayanan di Mal Pelayanan Publik maupun kegiatan Mosskeling.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung juga berusaha meminimalisir kendala-kendala atau permasalahan yang selama ini menghambat. Permasalahan DPMPTSP pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain;

- a. Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal
- b. Kompleksitas regulasi terkait kemudahan berinvestasi

Penyebab Masalah yang dihadapi DPMPTSP;

- Belum optimalnya promosi investasi yang terpadu berbasis data potensi unggulan daerah;
- Belum optimalnya integrasi kerjasama pengelolaan data antara DPMPTSP dengan BPS dan OPD teknis;
- Belum optimalnya implementasi regulasi terkait kemudahan berinvestasi terkait kemudahan berinvestasi dan perizinan (*payung hukum sedang dalam proses*)

Gambar Penyebab Masalah

No	Masalah	Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya Pengembangan iklim penanaman modal	- Belum optimalnya promosi investasi yang terpadu berbasis data potensi unggulan daerah - Belum optimalnya integrasi kerjasama pengelolaan data antara DPMPTSP dengan BPS dan OPD Teknis
2	Kompleksitas regulasi terkait kemudahan berinvestasi	Belum optimalnya implementasi regulasi terkait kemudahan berinvestasi dan perizinan (<i>payung hukum sedang dalam proses</i>)

Upaya yang Dilakukan DPMPTSP untuk Menyelesaikan Penyebab Masalah;

- Mengoptimalkan promosi investasi yang terpadu berbasis data potensi unggulan daerah;
- Mengoptimalkan integrasi kerjasama pengelolaan data antara DPMPTSP dengan BPS dan OPD teknis;

- Mengoptimalkan implementasi regulasi terkait kemudahan berinvestasi terkait kemudahan berinvestasi dan perizinan (payung hukum sedang dalam proses)

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

Investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani untuk memaksimalkan pertumbuhan realisasi investasi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berdasarkan tugas fungsi maka;

Isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yaitu:

1. Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal
2. Kompleksitas regulasi terkait kemudahan berinvestasi

Berikut Isu-isu yang relevan dengan DPMPTSP;

- KLHS

Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan daerah

- Global

- 1) Geopolitik dan geoekonomi
- 2) Pertumbuhan kelas menengah
- 3) Persaingan sumber daya alam
- 4) Konstelasi perdagangan global

- Nasional

- 1) Pergeseran struktur kelas masyarakat
- 2) Geopolitik dan geoekonomi
- 3) Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

- Regional

- 1) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
- 2) Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan

TABEL 2.2.2 Isu Strategis PD

Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan aksesibilitas dan potensi ekonomi di kawasan Selingkar Wilis dan Jalur Lintas Selatan	1. Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal 2. Kompleksitas regulasi terkait kemudahan berinvestasi	Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan daerah	Megatren Global 2045:	Tantangan pembangunan RPJMN:	Isu strategis RPJMD	Belum optimalnya pengembangan iklim investasi daerah
			1. Geopolitik dan geoekonomi	1. Pergeseran struktur kelas masyarakat	1. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	
			2. Pertumbuhan kelas menengah	2. Geopolitik dan geoekonomi		
			3. Persaingan sumber daya alam	3. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	2. Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan	
			4. Konstelasi perdagangan global			

Belum optimalnya pengembangan iklim investasi daerah disebabkan antara lain;

- 1. Kurangnya kepastian hukum dan insentif investasi.
- 2. Kurangnya Promosi Potensi Daerah
 - o Informasi peluang investasi belum tersosialisasikan dan tersebar luas di masyarakat
 - o Belum ada branding daerah sebagai destinasi investasi.
- 3. Kualitas Infrastruktur yang Kurang Mendukung
 - o Akses jalan, energi, air bersih, dan jaringan logistik belum siap di lokasi potensial investasi.
- 4. Lemahnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah
 - o Dinas terkait belum sinergis dalam fasilitasi investor
- 5. Belum adanya kebijakan daerah berkaitan dengan kemudahan berusah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut;

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

3. Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra PD											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Pengembangan iklim penanaman modal	Meningkatnya Investasi Daerah		Realisasi PMTB	5,39	5,40	5,41	5,42	5,43	5,44	5,45	
Sasaran RPJMD : Meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal											
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi	544 M	545 M	546 M	547 M	548 M	549 M	550 M	
			Realisasi Total terhadap Target Investasi	n.a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,10	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD

Tahun 2025-2029

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi DPMPTSP untuk Menyelesaikan Penyebab Masalah;

- Mengoptimalkan promosi investasi yang terpadu berbasis data potensi unggulan daerah; Melakukan Pemetaan Potensi Unggulan Daerah dan Mengupdate ke *T-Point*, melakukan pengembangan materi promosi dengan mengoptimalkan media sosial sebagai media promosi menarik seperti profil proyek, video, dan brosur digital dan keikutsertaan dalam event investasi, bekerja sama dengan provinsi untuk mengoptimalkan potensi investasi di daerah
- Mengoptimalkan integrasi kerjasama pengelolaan data antara DPMPTSP dengan BPS dan OPD teknis; untuk memperkuat validitas dan kredibilitas data investasi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan efisiensi promosi dan layanan investasi.
- Mengoptimalkan implementasi regulasi terkait kemudahan berinvestasi terkait kemudahan berinvestasi dan perizinan (payung hukum sedang dalam proses) Bertujuan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, menghindari kekosongan hukum yang menghambat pelayanan dan mendorong percepatan realisasi investasi sambil menunggu regulasi disahkan.

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.3. Tabel Penahapan Renstra PD Tahun 2025-2029

Penahapan Pembangunan Renstra PD				
Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan data peta potensi dan peluang investasi daerah	Penguatan kolaborasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal	Pengembangan strategi dan media promosi investasi yang terpadu dan berbasis data potensial	Akselerasi modernisasi pelayanan publik dan percepatan digitalisasi perizinan	Perwujudan kolaborasi antar sektor inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat serta pembentukan citra daerah sebagai tempat ramah investasi

3.4. Tabel Penjelasan Penahapan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Melakukan Pendataan dan menganalisa terhadap potensi daerah yang memiliki nilai jual investasi - Digitalisasi dengan memperbarui data secara berkala dan menyajikannya dalam bentuk digital di <i>T-Point</i> sebagai profil investasi yang siap ditawarkan kepada investor. - Melakukan Koordinasi Lintas Sektor, Melibatkan OPD, pemerintah	- Melakukan kerjasama dengan <i>stake holder</i> - Menyusun kebijakan daerah terkait dengan kemudahan berinvestasi - Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan di bidang penanaman modal	- Pemetaan Target Investor berdasarkan segmen investor: PMA, PMDN - Penguatan dan pengembangan sistem informasi berbasis potensi dan peluang investasi (<i>T-Point</i>) - Peningkatan promosi investasi secara terpadu	- Integrasi sistem informasi pelayanan publik - Peningkatan akses perizinan berbasis digital kepada masyarakat	- Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai sektor dalam upaya menjamin keamanan investasi - Memberikan insentif dan kemudahan perizinan - Meningkatkan daya saing daerah, mempercepat realisasi investasi, dan menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

provinsi, dunia usaha, untuk validasi dan penyempurnaan data Monitoring & Evaluasi untuk menarik minat investor dan memperbaiki data/promosi secara berkelanjutan.				
--	--	--	--	--

Tabel. 3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Arah Kebijakan Renstra PD			
Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Penguatan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan investasi agroindustri dan penguatan iklim investasi	Meningkatkan digitalisasi akses Penanaman Modal	-
		Meningkatkan inklusi data potensi Penanaman Modal	-
	Penguatan inovasi pelayanan publik	Fasilitasi Kemudahan Berinvestasi	-
		Penguatan Pelayanan Publik yang inklusif	-

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tulungagung untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah diuraikan di atas, maka telah membuat rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima (5) tahun ke depan, yaitu membuat rencana sebagai berikut;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang Dilaksanakan meliputi:

- Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD							
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengembangan iklim penanaman modal	Meningkatnya Investasi Daerah				Realisasi PMTB		
Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah		IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
					<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	

				Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
					<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	
				Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	
					<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	
					<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
					<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	

					<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
					<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	
					<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
				Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	
					<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	

				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	
					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				BMD yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	

					<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajakdan Perizinannya</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
					<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
					<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Realisasi Investasi		

					Realisasi Total terhadap Target Investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Nilai Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya Promosi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Jumlah Dokumen IPRO yang sesuai Standar	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	

			Meningkatnya penanaman modal jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
					Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Kegiatan Promosi	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					IKM atas Pelayanan Perizinan Berusaha		
				Terlaksananya pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS RBA dan Non OSS RBA	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

					<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	
					<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko</i>	
			Tersedianya data permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
					Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM		
				Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang Harus Diselesaikan	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		

					Jumlah Pelaku Usaha yang menindaklanjuti Hasil Pengawasan		
					<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	
					<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	
					<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal</i>	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

				Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Layanan Informasi yang mendukung Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Berusaha	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					5.263.044.539		5.346.358.534		5.409.659.419		5.474.250.752		5.539.832.276	DPMPTSP
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				4.768.044.539		4.843.530.534		4.900.865.419		4.959.386.752		5.018.792.276	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah	89,18	80		80	4.843.530.534	81	4.900.865.419	81	4.959.386.752	82	5.018.792.276	
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				660.000		680.000		690.000		700.000		710.000	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	8 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	710.000	
2.18.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	330.000	3 Dokumen	340.000	3 Dokumen	345.000	4 Dokumen	350.000	4 Dokumen	355.000	
2.18.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	12 Laporan	330.000	12 Laporan	340.000	12 Laporan	345.000	12 Laporan	350.000	12 Laporan	355.000	
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.027.046.639		4.090.769.534		4.139.186.419		4.188.608.752		4.238.789.276	
	Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	1 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	4.090.769.534	4 dokumen	4.139.186.419	1 dokumen	4.188.608.752	1 dokumen	4.238.789.276	
2.18.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 org/bln	23 org/bln	3.959.096.639	23 org/bln	4.021.769.534	23 org/bln	4.069.386.419	23 org/bln	4.117.975.752	23 org/bln	4.167.309.276	
2.18.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	67.950.000	1 dokumen	69.000.000	1 dokumen	69.800.000		70.633.000	1 dokumen	71.480.000	
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.953.900		21.285.000		21.545.000		21.801.000		22.057.000	
	Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 paket	23 paket	11.500.000	23 paket	11.680.000	23 paket	11.820.000	23 paket	11.961.000	23 paket	12.100.000	

2.18.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	1 orang	7.246.000	1 orang	7.360.000	1 orang	7.450.000	1 orang	7.538.000	1 orang	7.628.000	
2.18.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 orang	44 orang	2.207.900	44 orang	2.245.000	44 orang	2.275.000	44 orang	2.302.000	44 orang	2.329.000	
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				83.778.400		85.126.000		86.210.000		87.241.000		88.280.000	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Disediakan	8 paket	16 paket	1.102.900	16 paket	1.120.000	16 paket	1.140.000	16 paket	1.153.000	16 paket	1.155.000	
2.18.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 paket	44 paket	22.127.100	44 paket	22.476.000	44 paket	22.750.000	44 paket	23.021.000	44 paket	23.300.000	
2.18.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	25 paket	3.025.400	25 paket	3.100.000	25 paket	3.160.000	25 paket	3.200.000	25 paket	3.240.000	
2.18.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	7 paket	8.042.000	7 paket	8.180.000	7 paket	8.300.000	7 paket	8.399.000	7 paket	8.500.000	
2.18.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.050.000	12 Laporan	3.100.000	12 Laporan	3.138.000	12 Laporan	3.175.000	
2.18.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	46.481.000	12 Laporan	47.200.000	12 Laporan	47.760.000	12 Laporan	48.330.000	12 Laporan	48.910.000	
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.404.000	100%	2.441.000	100%	2.480.000	100%	2.509.000	100%	2.538.000	
	Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi		100%	2.404.000		2.441.000	100%	2.480.000	100%	2.509.000	100%	2.538.000	
2.18.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 unit	2 unit	1.165.000	2 unit	1.183.000	2 unit	1.200.000	2 unit	1.214.000	2 unit	1.228.000	
2.18.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	1 unit	1.239.000	1 unit	1.258.000	1 unit	1.280.000	1 unit	1.295.000	1 unit	1.310.000	
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				532.341.600		540.772.000		547.086.000		553.623.000		560.260.000	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	300.000	12 Laporan	310.000	12 Laporan	320.000	12 Laporan	330.000	12 Laporan	340.000	
2.18.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.200.000	12 Laporan	138.356.000	12 Laporan	139.900.000	12 Laporan	141.570.000	12 Laporan	143.266.000	

2.18.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.000.000	12 Laporan	173.706.000	12 Laporan	175.762.000	12 Laporan	177.860.000	12 Laporan	179.990.000	
2.18.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	224.841.600	12 Laporan	228.400.000	12 Laporan	231.104.000	12 Laporan	233.863.000	12 Laporan	236.664.000	
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.860.000		102.457.000		103.668.000		104.904.000		106.158.000	

	BMD yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	2 unit	72.210.000	2 unit	73.353.000	2 unit	74.220.000	2 unit	75.106.000	2 unit	76.005.000	
2.18.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajakdan Perizinannya	17 unit	19 unit	10.000.000	19 unit	10.160.000	19 unit	10.280.000	19 unit	10.402.000	19 unit	10.526.000	
2.18.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	8.500.000	2 unit	8.634.000	2 unit	8.736.000	2 unit	8.840.000	2 unit	8.945.000	
2.18.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	60 unit	10.150.000	60 unit	10.310.000	60 unit	10.432.000	60 unit	10.556.000	60 unit	10.682.000	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi	1.455 M	1.457 M		1.458 M		1.459 M		1.460 M		1.461 M		
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000	
	Tersedianya Promosi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Jumlah Dokumen IPRO yang sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.791.000	2 Dokumen	101.392.000	2 Dokumen	102.005.000	2 Dokumen	102.630.000	
2.18.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.791.000	2 Dokumen	101.392.000	2 Dokumen	102.005.000	2 Dokumen	102.630.000	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal				70.000.000		71.107.000		71.952.000		72.810.000		73.685.000	
	Meningkatnya Penanaman Modal jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-36%	0,35%		0,40%		0,45%		0,50%		0,55%		
		Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	-38,40%	0,06%		0,061%		0,062%		0,063%		0,064%		

2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah				70.000.000		71.107.000		71.952.000		72.810.000		73.685.000	
	Terlaksananya Kegiatan Promosi	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
2.18.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.791.000	1 Dokumen	51.392.000	1 Dokumen	52.005.000	1 Dokumen	52.630.000	
2.18.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	na	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.316.000	1 Dokumen	20.560.000	1 Dokumen	20.805.000	1 Dokumen	21.055.000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				140.000.000		141.737.000		143.060.000		144.409.000		145.785.000	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	#REF!	
		IKM atas Pelayanan Perizinan Berusaha	89,18	80		81		82		83		84		
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				140.000.000		141.737.000		143.060.000		144.409.000		145.785.000	
	Terlaksananya pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS RBA dan non OSS RBA	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	105.000.000	500 Pelaku Usaha	106.187.000	500 Pelaku Usaha	107.090.000	500 Pelaku Usaha	108.010.000	500 Pelaku Usaha	108.950.000	
2.18.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	35.000.000	20 Pelaku Usaha	35.550.000	20 Pelaku Usaha	35.970.000	20 Pelaku Usaha	36.399.000	20 Pelaku Usaha	36.835.000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				115.000.000	0	116.819.000	0	118.210.000	0	119.620.000	0	121.050.000	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Sesuai Standar	54,60%	70,00%		71,00%		72,00%		73,00%		74,00%		
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000		116.819.000		118.210.000		119.620.000		121.050.000	

		Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang Harus Diselesaikan	na	2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		
	Tersedianya data permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis	339 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		
		Jumla Pelaku Usaa yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan	141 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		
2.18.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	na	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.316.000	2 Laporan	20.560.000	2 Laporan	20.805.000	2 Laporan	21.050.000	
2.18.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	339 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	75.000.000	150 Pelaku Usaha	76.187.000	150 Pelaku Usaha	77.090.000	150 Pelaku Usaha	78.010.000	150 Pelaku Usaha	78.950.000	
2.18.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	142 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	20.000.000	24 Kegiatan Usaha	20.316.000	24 Kegiatan Usaha	20.560.000	24 Kegiatan Usaha	20.805.000	24 Kegiatan Usaha	21.050.000	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				70.000.000		72.374.000		74.180.000		76.020.000		77.890.000	
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000	12 Dokumen	72.374.000	12 Dokumen	74.180.000	12 Dokumen	76.020.000	12 Dokumen	77.890.000	
	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Layanan Informasi yang mendukung Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Berusaha	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
2.18.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	72.374.000	12 Dokumen	74.180.000	12 Dokumen	76.020.000	12 Dokumen	77.890.000	

4.3 Tabel Daftar Program Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

4.4 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD										
No .	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Realisasi PMTB	Milyar Rupiah	8.488,02	9.127,77	9.539,58	10.102,34	10.831,19	11.507,64	12.194,47	
2	Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	544 M	545M	546M	547M	548M	549M	550M	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	n.a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71,10	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06	

4.5 Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci PD										
No .	Indikator	Satuan	Baseline Tahun	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-38,40	0,059%	0,06%	0,061%	0,062%	0,063%	0,064%	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	n.a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

BAB V

PENUTUP

- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan.
- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 juga berpedoman pada, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.
- Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah.
- Pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.
- Dirumuskannya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, hasil program, dan kegiatan Renstra secara berkala.
- Kewajiban bagi seluruh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung untuk berpartisipasi dan berkomitmen dalam pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan Renstra Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2029

- Dengan adanya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dapat terlaksana secara terencana, terukur dan berkesinambungan.
- Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tulungagung, 19 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. TULUNGAGUNG



Def. IMROATUL MUFIDAH, M.Si
Pemhina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006

LAMPIRAN

1. FORM KERTAS KERJA PENYUSUNAN RENSTRA PD

Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan		
No	Masalah	Penyebab Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya Pengembangan iklim penanaman modal	- Belum optimalnya promosi investasi yang terpadu berbasis data potensi unggulan daerah - Belum optimalnya integrasi kerjasama pengelolaan data antara DPMPSTP dengan BPS dan OPD Teknis
2	Kompleksitas regulasi terkait kemudahan berinvestasi	Belum optimalnya implementasi regulasi terkait kemudahan berinvestasi dan perizinan (<i>payung hukum sedang dalam proses</i>)

Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
Peningkatan aksesibilitas dan potensi ekonomi di kawasan Selingkar Wilis dan Jalur Lintas Selatan	1. Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal 2. Kompleksitas regulasi terkait kemudahan berinvestasi	Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor unggulan daerah	Megatren Global 2045:	Tantangan pembangunan RPJMN:	Isu strategis RPJMD	Belum optimalnya pengembangan iklim investasi daerah
			1. Geopolitik dan geoekonomi	1. Pergeseran struktur kelas masyarakat	1. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	
			2. Pertumbuhan kelas menengah	2. Geopolitik dan geoekonomi		
			3. Persaingan sumber daya alam	3. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	2. Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan	
			4. Konstelasi perdagangan global			

3. Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra PD										
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Pengembangan iklim penanaman modal	Meningkatnya Investasi Daerah		Realisasi PMTB	8.488,02	9.127,77	9.539,58	10.102,34	10.831,19	11.507,64	12.194,47
Sasaran RPJMD : Meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal										
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi	544 M	545 M	546 M	547 M	548 M	549 M	550 M
			Realisasi Total terhadap Target Investasi	n.a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,10	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06

4. Penahapan Pembangunan Renstra PD				
Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan data peta potensi dan peluang investasi daerah	Penguatan kolaborasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal	Pengembangan strategi dan media promosi investasi yang terpadu dan berbasis data potensial	Akselerasi modernisasi pelayanan publik dan percepatan digitalisasi perizinan	Perwujudan kolaborasi antar sektor inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat serta pembentukan citra daerah sebagai tempat ramah investasi

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD							
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengembangan iklim penanaman modal	Meningkatnya Investasi Daerah				Realisasi PMTB		
Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah		IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
					<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	
				Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
					<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	
				Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	
					<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
					<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	
					<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	

					<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
					<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	
					<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	
					<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
				Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	
					<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	

					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
					<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				BMD yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
					<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajakdan Perizinannya</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
					<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	

					<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Realisasi Investasi		

					Realisasi Total terhadap Target Investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Nilai Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya Promosi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Jumlah Dokumen IPRO yang sesuai Standar	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	
			Meningkatnya penanaman modal jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
					Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Kegiatan Promosi	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

					IKM atas Pelayanan Perizinan Berusaha		
				Terlaksananya pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS RBA dan Non OSS RBA	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	
					<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko</i>	

			Tersedianya data permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
					Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM		
				Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang Harus Diselesaikan	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		
					Jumlah Pelaku Usaha yang menindaklanjuti Hasil Pengawasan		
					<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	

					<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	
					<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal</i>	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

				Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Layanan Informasi yang mendukung Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Berusaha	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan														
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output		Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
				2026		2027	2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					5.263.044.539		5.346.358.534		5.409.659.419		5.474.250.752		5.539.832.276	DPMPTSP
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				4.768.044.539		4.843.530.534		4.900.865.419		4.959.386.752		5.018.792.276	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah	89,18	80		80	4.843.530.534	81	4.900.865.419	81	4.959.386.752	82	5.018.792.276	
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				660.000		680.000		690.000		700.000		710.000	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	8 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	710.000	
2.18.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3 Dokumen	330.000	3 Dokumen	340.000	3 Dokumen	345.000	4 Dokumen	350.000	4 Dokumen	355.000	
2.18.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	12 Laporan	330.000	12 Laporan	340.000	12 Laporan	345.000	12 Laporan	350.000	12 Laporan	355.000	
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.027.046.639		4.090.769.534		4.139.186.419		4.188.608.752		4.238.789.276	
	Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	1 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	4.090.769.534	4 dokumen	4.139.186.419	1 dokumen	4.188.608.752	1 dokumen	4.238.789.276	
2.18.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 org/bln	23 org/bln	3.959.096.639	23 org/bln	4.021.769.534	23 org/bln	4.069.386.419	23 org/bln	4.117.975.752	23 org/bln	4.167.309.276	
2.18.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	67.950.000	1 dokumen	69.000.000	1 dokumen	69.800.000		70.633.000	1 dokumen	71.480.000	
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.953.900		21.285.000		21.545.000		21.801.000		22.057.000	
	Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 paket	23 paket	11.500.000	23 paket	11.680.000	23 paket	11.820.000	23 paket	11.961.000	23 paket	12.100.000	
2.18.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	1 orang	7.246.000	1 orang	7.360.000	1 orang	7.450.000	1 orang	7.538.000	1 orang	7.628.000	
2.18.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 orang	44 orang	2.207.900	44 orang	2.245.000	44 orang	2.275.000	44 orang	2.302.000	44 orang	2.329.000	

2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				83.778.400		85.126.000		86.210.000		87.241.000		88.280.000	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Disediakan	8 paket	16 paket	1.102.900	16 paket	1.120.000	16 paket	1.140.000	16 paket	1.153.000	16 paket	1.155.000	
2.18.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	57 paket	44 paket	22.127.100	44 paket	22.476.000	44 paket	22.750.000	44 paket	23.021.000	44 paket	23.300.000	
2.18.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	25 paket	3.025.400	25 paket	3.100.000	25 paket	3.160.000	25 paket	3.200.000	25 paket	3.240.000	
2.18.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	7 paket	8.042.000	7 paket	8.180.000	7 paket	8.300.000	7 paket	8.399.000	7 paket	8.500.000	
2.18.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.050.000	12 Laporan	3.100.000	12 Laporan	3.138.000	12 Laporan	3.175.000	
2.18.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	46.481.000	12 Laporan	47.200.000	12 Laporan	47.760.000	12 Laporan	48.330.000	12 Laporan	48.910.000	
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.404.000	100%	2.441.000	100%	2.480.000	100%	2.509.000	100%	2.538.000	
	Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi		100%	2.404.000		2.441.000	100%	2.480.000	100%	2.509.000	100%	2.538.000	
2.18.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 unit	2 unit	1.165.000	2 unit	1.183.000	2 unit	1.200.000	2 unit	1.214.000	2 unit	1.228.000	
2.18.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	1 unit	1.239.000	1 unit	1.258.000	1 unit	1.280.000	1 unit	1.295.000	1 unit	1.310.000	
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				532.341.600		540.772.000		547.086.000		553.623.000		560.260.000	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	300.000	12 Laporan	310.000	12 Laporan	320.000	12 Laporan	330.000	12 Laporan	340.000	
2.18.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.200.000	12 Laporan	138.356.000	12 Laporan	139.900.000	12 Laporan	141.570.000	12 Laporan	143.266.000	
2.18.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.000.000	12 Laporan	173.706.000	12 Laporan	175.762.000	12 Laporan	177.860.000	12 Laporan	179.990.000	
2.18.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	224.841.600	12 Laporan	228.400.000	12 Laporan	231.104.000	12 Laporan	233.863.000	12 Laporan	236.664.000	
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.860.000		102.457.000		103.668.000		104.904.000		106.158.000	

	BMD yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	2 unit	72.210.000	2 unit	73.353.000	2 unit	74.220.000	2 unit	75.106.000	2 unit	76.005.000	
2.18.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajakdan Perizinannya	17 unit	19 unit	10.000.000	19 unit	10.160.000	19 unit	10.280.000	19 unit	10.402.000	19 unit	10.526.000	
2.18.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	8.500.000	2 unit	8.634.000	2 unit	8.736.000	2 unit	8.840.000	2 unit	8.945.000	
2.18.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	60 unit	10.150.000	60 unit	10.310.000	60 unit	10.432.000	60 unit	10.556.000	60 unit	10.682.000	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi	1.455 M	1.457 M		1.458 M		1.459 M		1.460 M		1.461 M		
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000	
	Tersedianya Promosi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Jumlah Dokumen IPRO yang sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.791.000	2 Dokumen	101.392.000	2 Dokumen	102.005.000	2 Dokumen	102.630.000	
2.18.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.791.000	2 Dokumen	101.392.000	2 Dokumen	102.005.000	2 Dokumen	102.630.000	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal				70.000.000		71.107.000		71.952.000		72.810.000		73.685.000	
	Meningkatnya Penanaman Modal jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-36%	0,35%		0,40%		0,45%		0,50%		0,55%		
		Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	-38,40%	0,06%		0,061%		0,062%		0,063%		0,064%		
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah				70.000.000		71.107.000		71.952.000		72.810.000		73.685.000	
	Terlaksananya Kegiatan Promosi	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
2.18.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.791.000	1 Dokumen	51.392.000	1 Dokumen	52.005.000	1 Dokumen	52.630.000	

2.18.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	na	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.316.000	1 Dokumen	20.560.000	1 Dokumen	20.805.000	1 Dokumen	21.055.000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				140.000.000		141.737.000		143.060.000		144.409.000		145.785.000	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	#REF!	
		IKM atas Pelayanan Perizinan Berusaha	89,18	80		81		82		83		84		
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				140.000.000		141.737.000		143.060.000		144.409.000		145.785.000	
	Terlaksananya pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS RBA dan non OSS RBA	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	105.000.000	500 Pelaku Usaha	106.187.000	500 Pelaku Usaha	107.090.000	500 Pelaku Usaha	108.010.000	500 Pelaku Usaha	108.950.000	
2.18.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	35.000.000	20 Pelaku Usaha	35.550.000	20 Pelaku Usaha	35.970.000	20 Pelaku Usaha	36.399.000	20 Pelaku Usaha	36.835.000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				115.000.000	0	116.819.000	0	118.210.000	0	119.620.000	0	121.050.000	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Sesuai Standar	54,60%	70,00%		71,00%		72,00%		73,00%		74,00%		
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000		116.819.000		118.210.000		119.620.000		121.050.000	
	Tersedianya data permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang Harus Diselesaikan	na	2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		2 Kegiatan Usaha		
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis	339 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		
		Jumla Pelaku Usaa yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan	141 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		24 Kegiatan Usaha		

2.18.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	na	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.316.000	2 Laporan	20.560.000	2 Laporan	20.805.000	2 Laporan	21.050.000	
2.18.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	339 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	75.000.000	150 Pelaku Usaha	76.187.000	150 Pelaku Usaha	77.090.000	150 Pelaku Usaha	78.010.000	150 Pelaku Usaha	78.950.000	
2.18.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	142 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	20.000.000	24 Kegiatan Usaha	20.316.000	24 Kegiatan Usaha	20.560.000	24 Kegiatan Usaha	20.805.000	24 Kegiatan Usaha	21.050.000	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				70.000.000		72.374.000		74.180.000		76.020.000		77.890.000	
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000	12 Dokumen	72.374.000	12 Dokumen	74.180.000	12 Dokumen	76.020.000	12 Dokumen	77.890.000	
	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Layanan Informasi yang mendukung Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Berusaha	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
2.18.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	72.374.000	12 Dokumen	74.180.000	12 Dokumen	76.020.000	12 Dokumen	77.890.000	

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perzinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

3. DEFINISI OPERASIONAL

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Level (Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan)
1	Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	PMTB adalah penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (<i>financial leasing</i>) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (<i>Cultivated Biological Resources/CBR</i>). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta	Metode Langsung $PMTBadhk = \frac{PMTBadhb}{IHPB}$ Metode Tidak Langsung PMTB atas dasar harga konstan (t) = PMTB atas dasar harga konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)	Tujuan

			mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (<i>Consumption of Fixed Capital</i>) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.		
2	Realisasi Investasi	Rupiah	Realisasi investasi adalah nilai investasi yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).	Rilis data topdown dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	Sasaran
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	Capaian realisasi investasi terhadap target investasi dari BKPM Provinsi	$\frac{\text{Realisasi Investasi}}{\text{Target Investasi BKPM Provinsi}} \times 100\%$	Sasaran/IKK
4	Nilai Investasi	Rupiah	Nilai investasi yang diperoleh dari OSS yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).	Nilai Data di OSS	Program
5	Jumlah Dokumen IPRO yang sesuai Standar	Dokumen	Dokumen IPRO yang memenuhi 7 aspek yaitu (1) Aspek legal dan administrasi, (2) Aspek Teknis, (3) Aspek Pasar, (4) Aspek Sosial dan Ekonomi, (5) Aspek lingkungan, (6) Aspek Keuangan, (7) Aspek berkelanjutan	Berdasarkan Jumlah Dokumen IPRO yang sesuai Standar	Kegiatan

6	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	Peningkatan Jumlah investor berdasarkan data dari OSS yaitu jumlah NIB yang terbit pada Tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	$\frac{\text{NIB tahun } (n) - \text{NIB tahun } (n - 1)}{\text{NIB tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Program
7	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	Peningkatan jumlah nilai investasi tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan data dari OSS	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n - \text{Jumlah nilai investasi tahun } n - 1}{\text{Jumlah nilai investasi tahun } n - 1} \times 100\%$	Program / IKK
8	Jumlah Laporan Kegiatan Promosi	Laporan	Jumlah dokumen laporan kegiatan promosi	Berdasarkan Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Promosi	Kegiatan
9	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Sesuai Standar	%	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM terverifikasi dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha tidak terverifikasi	$\frac{\text{Jumlah LKPM terverifikasi}}{\text{Jumlah LKPM tidak terverifikasi}} \times 100\%$	Kegiatan
10	Jumlah Laporan Permasalahan dan Hambatan yang Harus Diselesaikan	Laporan	Jumlah Permasalahan dan hambatan dalam pembinaan dan pengawasan yang harus diselesaikan	Berdasarkan Data Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Kegiatan
11	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis yang belum melakukan LKPM	Berdasarkan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Kegiatan

12	Jumlah Pelaku Usaha yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan kegiatan usahanya dalam LKPM dan terverifikasi	Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan	Kegiatan
13	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Izin yang terbit tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang terbit}} \times 100\%$	Kegiatan
14	IKM atas Pelayanan Perizinan Berusaha	Indek Angka	Nilai IKM diperoleh dari survey umpan balik layanan yang diisi oleh penerima layanan perizinan, didapat dari kuisioner aplikasi mpp digital & aplikasi e-sukma jatim	Nilai Ikm = rata-rata dari nilai Ikm dari mpp digital & nilai Ikm dari aplikasi e sukma	Kegiatan
15	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	Pengaduan berasal dari permasalahan terkait perizinan yang diajukan ke DPMPTSP	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang sudah di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Kegiatan
16	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	Permintaan Data OSS sesuai peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Data}}{\text{Jumlah Permintaan Data}} \times 100\%$	Program
17	Jumlah Layanan Informasi yang mendukung Kegiatan Penanaman Modal dan	Dokumen	Tersedianya sistem informasi penanaman modal dan pelayanan berusaha yang terintegrasi	Jumlah laporan informasi penanaman modal dan pelayanan berusaha	Kegiatan

	Pelayanan Berusaha				
18	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks Angka	Nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DPMPTSP yang dilakukan oleh inspektorat	Berdasarkan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021	Sasaran
19	IKM Perangkat Daerah	Indeks Angka	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari sekretariat perangkat daerah	IKM= (Jumlah Responden×Jumlah Unsur Jumlah Skor Jawaban)×25	Program
20	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Dokumen	Dapat melihat ke: Renja, DPA, Evarenja, LKPJ, Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan, LCK Triwulanan, LKjIP	Berdasarkan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi	Kegiatan
21	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	Dokumen	Dapat melihat ke: Laporan Keuangan, LRA, SPJ Fungsional Bulanan, Neraca Saldo Bulanan	Berdasarkan Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi	Kegiatan

22	Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar	%	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar / jumlah seluruh layanan administrasi kepegawaian yang diberikan x 100% Dapat melihat ke: Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK), Dokumen Jabatan dan Mutasi (SK), Dokumen kenaikan pangkat Pegawai, Laporan Presensi Bulanan, Data Pegawai, SKP pegawai, Usulan Cuti Pegawai	$\frac{\text{Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar}}{\text{jumlah seluruh layanan administrasi kepegawaian yang diberikan}} \times 100\%$	Kegiatan
23	Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi/ jumlah seluruh layanan administrasi yang dibutuhkan x 100% Dapat melihat ke: SOP, laporan penyediaan layanan umum, dokumen register surat menyurat	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi}}{\text{jumlah seluruh layanan administrasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Kegiatan
24	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	%	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi/jumlah seluruh pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan x 100% Dapat melihat ke: Dokumen pengadaan barang milik daerah	$\frac{\text{Total seluruh pengadaan barang milik daerah}}{\text{Jumlah pengadaan barang milik daerah yang sesuai regulasi}} \times 100\%$	Kegiatan
25	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	%	Jumlah kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi/ jumlah seluruh kebutuhan jasa penunjang yang dibutuhkan x 100% Dapat melihat ke: Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Dokumen kontrak untuk pengadaan (SP atau SPK)	$\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh Kebutuhan Jasa Penunjang Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$	Kegiatan

26	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi/jumlah seluruh pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan x 100% Dapat melihat ke: Dokumen pengadaan barang milik daerah	$\frac{\text{Total seluruh pengadaan barang milik daerah}}{\text{Jumlah pengadaan barang milik daerah yang sesuai regulasi}} \times 100\%$	Kegiatan
----	---	---	---	--	----------

4. HASIL LAPORAN RENSTRA DARI SIPD BANGDA

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
- Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya Investasi Daerah		Realisasi PMTB (%)	8.488,02	9.127,77	9.539,58	10.102,34	10.831,19	11.507,64	12.194,47	
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	544	545	546	547	548	549	550	
			Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	0	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,1	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06	

**TABEL 4.1 PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.263.044.539		5.346.358.534		5.409.659.419		5.474.250.752		5.539.832.276	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.768.044.539		4.843.530.534		4.900.865.419		4.959.386.752		5.018.792.276	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	89,18	80	80	4.768.044.539	80	4.843.530.534	81	4.900.865.419	81	4.959.386.752	82	5.018.792.276	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000	

Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi (Miliar) (Angka)	1.455	1.456	1.457	100.000.000	1.458	100.791.000	1.459	101.392.000	1.460	102.005.000	1.461	102.630.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					70.000.000		71.107.000		71.952.000		72.810.000		73.685.000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-36	0,3	0,35	70.000.000	0,4	71.107.000	0,45	71.952.000	0,5	72.810.000	0,55	73.685.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	-38,4	0,059	0,06		0,061		0,062		0,063		0,064		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					140.000.000		141.737.000		143.060.000		144.409.000		145.785.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perizinan Berusaha (Indeks)	89,18	80	80	140.000.000	81	141.737.000	82	143.060.000	83	144.409.000	84	145.785.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					115.000.000		116.819.000		118.210.000		119.620.000		121.050.000	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	115.000.000	100	116.819.000	100	118.210.000	100	119.620.000	100	121.050.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM sesuai standar (%)	54,6	70	70		71		72		73		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					70.000.000		72.374.000		74.180.000		76.020.000		77.890.000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	70.000.000	100	72.374.000	100	74.180.000	100	76.020.000	100	77.890.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
TOTAL KESELURUHAN					5263044539.00		5346358534.00		5409659419.00		5474250752.00		5539832276.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
- Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Realisasi PMTB (%)		
					Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Nilai Investasi (Miliar) (Angka)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Tersedianya Promosi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
					Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Kegiatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perizinan Berusaha (Indeks)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik melalui OSS RBA dan Non OSS RBA	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
					Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM sesuai standar (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

				Tersedianya Data Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	---	--	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

				Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah		IKM Perangkat Daerah (Indeks)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

				Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				BMD yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
--	--	--	--	--	---	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-38,4	0,059	0,06	0,061	0,062	0,063	0,064	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.263.044.539		5.346.358.534		5.409.659.419		5.474.250.752		5.539.832.276		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.768.044.539		4.843.530.534		4.900.865.419		4.959.386.752		5.018.792.276		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Indeks)	89,18	80	4.768.044.539	80	4.843.530.534	81	4.900.865.419	81	4.959.386.752	82	5.018.792.276	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				660.000		680.000		690.000		700.000		710.000		
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	12	660.000	12	680.000	12	690.000	12	700.000	12	710.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	3		3		3		3		3			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				330.000		340.000		345.000		350.000		355.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	3	330.000	3	340.000	3	345.000	3	350.000	3	355.000		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				330.000		340.000		345.000		350.000		355.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	12	330.000	12	340.000	12	345.000	12	350.000	12	355.000		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.027.046.639		4.090.769.534		4.139.186.419		4.188.608.752		4.238.789.276		
Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23	4.027.046.639	23	4.090.769.534	23	4.139.186.419	23	4.188.608.752	23	4.238.789.276		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.959.096.639		4.021.769.534		4.069.386.419		4.117.975.752		4.167.309.276		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23	3.959.096.639	23	4.021.769.534	23	4.069.386.419	23	4.117.975.752	23	4.167.309.276		
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				67.950.000		69.000.000		69.800.000		70.633.000		71.480.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	67.950.000	1	69.000.000	1	69.800.000	1	70.633.000	1	71.480.000		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.953.900		21.285.000		21.545.000		21.801.000		22.057.000		

Pegawai perangkat daerah terfasilitasi administrasi kepegawaian sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	44	44	20.953.900	44	21.285.000	44	21.545.000	44	21.801.000	44	22.057.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50	23		23		23		23		23			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	1		1		1		1					
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				11.500.000		11.680.000		11.820.000		11.961.000		12.100.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50	23	11.500.000	23	11.680.000	23	11.820.000	23	11.961.000	23	12.100.000		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7.246.000		7.360.000		7.450.000		7.538.000		7.628.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	1	7.246.000	1	7.360.000	1	7.450.000	1	7.538.000	1	7.628.000		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2.207.900		2.245.000		2.275.000		2.302.000		2.329.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	44	44	2.207.900	44	2.245.000	44	2.275.000	44	2.302.000	44	2.329.000		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				83.778.400		85.126.000		86.210.000		87.241.000		88.280.000		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	83.778.400	12	85.126.000	12	86.210.000	12	87.241.000	12	88.280.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	57	44		44		44		44		44			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	16		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.102.900		1.120.000		1.140.000		1.153.000		1.155.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	16	1.102.900	16	1.120.000	16	1.140.000	16	1.153.000	16	1.155.000		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.127.100		22.476.000		22.750.000		23.021.000		23.300.000		

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	57	44	22.127.100	44	22.476.000	44	22.750.000	44	23.021.000	44	23.300.000		
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.025.400		3.100.000		3.160.000		3.200.000		3.240.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9	25	3.025.400	25	3.100.000	25	3.160.000	25	3.200.000	25	3.240.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.042.000		8.180.000		8.300.000		8.399.000		8.500.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	7	8.042.000	7	8.180.000	7	8.300.000	7	8.399.000	7	8.500.000		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000		3.050.000		3.100.000		3.138.000		3.175.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	3.000.000	12	3.050.000	12	3.100.000	12	3.138.000	12	3.175.000		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.481.000		47.200.000		47.760.000		48.330.000		48.910.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	46.481.000	12	47.200.000	12	47.760.000	12	48.330.000	12	48.910.000		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.404.000		2.441.000		2.480.000		2.509.000		2.538.000		
Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	1	2.404.000	1	2.441.000	1	2.480.000	1	2.509.000	1	2.538.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	2		2		2		2		2			
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.165.000		1.183.000		1.200.000		1.214.000		1.228.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	2	1.165.000	2	1.183.000	2	1.200.000	2	1.214.000	2	1.228.000		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.239.000		1.258.000		1.280.000		1.295.000		1.310.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	1	1.239.000	1	1.258.000	1	1.280.000	1	1.295.000	1	1.310.000		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				532.341.600		540.772.000		547.086.000		553.623.000		560.260.000		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	532.341.600	12	540.772.000	12	547.086.000	12	553.623.000	12	560.260.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		310.000		320.000		330.000		340.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	300.000	12	310.000	12	320.000	12	330.000	12	340.000		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.200.000		138.356.000		139.900.000		141.570.000		143.266.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	136.200.000	12	138.356.000	12	139.900.000	12	141.570.000	12	143.266.000		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				171.000.000		173.706.000		175.762.000		177.860.000		179.990.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	171.000.000	12	173.706.000	12	175.762.000	12	177.860.000	12	179.990.000		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				224.841.600		228.400.000		231.104.000		233.863.000		236.664.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	224.841.600	12	228.400.000	12	231.104.000	12	233.863.000	12	236.664.000		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.860.000		102.457.000		103.668.000		104.904.000		106.158.000		
BMD yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	100.860.000	2	102.457.000	2	103.668.000	2	104.904.000	2	106.158.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	60		60		60		60					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	2		2		2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	19		19		19		19					
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				72.210.000		73.353.000		74.220.000		75.106.000		76.005.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	2	72.210.000	2	73.353.000	2	74.220.000	2	75.106.000	2	76.005.000		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.160.000		10.280.000		10.402.000		10.526.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	19	10.000.000	19	10.160.000	19	10.280.000	19	10.402.000	19	10.526.000		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.500.000		8.634.000		8.736.000		8.840.000		8.945.000		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	8.500.000	2	8.634.000	2	8.736.000	2	8.840.000	2	8.945.000		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.150.000		10.310.000		10.432.000		10.556.000		10.682.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	60	10.150.000	60	10.310.000	60	10.432.000	60	10.556.000	60	10.682.000		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi (Miliar) (Angka)	1.455	1.457	100.000.000	1.458	100.791.000	1.459	101.392.000	1.460	102.005.000	1.461	102.630.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000		
Tersedianya Promosi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	100.000.000	2	100.791.000	2	101.392.000	2	102.005.000	2	102.630.000		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.000.000		100.791.000		101.392.000		102.005.000		102.630.000		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	100.000.000	2	100.791.000	2	101.392.000	2	102.005.000	2	102.630.000		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				70.000.000		71.107.000		71.952.000		72.810.000		73.685.000		
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	-36	0,35	70.000.000	0,4	71.107.000	0,45	71.952.000	0,5	72.810.000	0,55	73.685.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	-38,4	0,06		0,061		0,062		0,063		0,064			
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000		71.107.000		71.952.000		72.810.000		73.685.000		
Terlaksananya Kegiatan Promosi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	70.000.000	1	71.107.000	1	71.952.000	11	72.810.000	1	73.685.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.791.000		51.392.000		52.005.000		52.630.000		

Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.791.000	1	51.392.000	1	52.005.000	1	52.630.000		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		20.316.000		20.560.000		20.805.000		21.055.000		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.316.000	1	20.560.000	11	20.805.000	1	21.055.000		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				140.000.000		141.737.000		143.060.000		144.409.000		145.785.000		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	140.000.000	100	141.737.000	100	143.060.000	100	144.409.000	100	145.785.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perizinan Berusaha (Indeks)	89,18	80		81		82		83		84					
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				140.000.000		141.737.000		143.060.000		144.409.000		145.785.000				
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik melalui OSS RBA dan Non OSS RBA	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	80	20	140.000.000	20	141.737.000	20	143.060.000	20	144.409.000	20	145.785.000				
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	80	500		500				500				500			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				105.000.000		106.187.000		107.090.000		108.010.000		108.950.000				
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	80	500	105.000.000	500	106.187.000	500	107.090.000	500	108.010.000	500	108.950.000				
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				35.000.000		35.550.000		35.970.000		36.399.000		36.835.000				

Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	80	20	35.000.000	20	35.550.000	20	35.970.000	20	36.399.000	20	36.835.000			
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				115.000.000		116.819.000		118.210.000		119.620.000		121.050.000			
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	115.000.000	100	116.819.000	100	118.210.000	100	119.620.000	100	121.050.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM sesuai standar (%)	54,6	70				71				72				73
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000		116.819.000		118.210.000		119.620.000		121.050.000			
Tersedianya Data Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	4	2	115.000.000	2	116.819.000	2	118.210.000	2	119.620.000	2	121.050.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	339	150		150		150		150		150					
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	42	24		24		24		24							
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20.000.000		20.316.000		20.560.000		20.805.000		21.050.000				
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	4	2	20.000.000	2	20.316.000	2	20.560.000	2	20.805.000	2	21.050.000				
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				75.000.000		76.187.000		77.090.000		78.010.000		78.950.000				

Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	339	150	75.000.000	150	76.187.000	150	77.090.000	150	78.010.000	150	78.950.000		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				20.000.000		20.316.000		20.560.000		20.805.000		21.050.000		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	42	24	20.000.000	24	20.316.000	24	20.560.000	24	20.805.000	24	21.050.000		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				70.000.000		72.374.000		74.180.000		76.020.000		77.890.000		
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	70.000.000	100	72.374.000	100	74.180.000	100	76.020.000	100	77.890.000	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000		72.374.000		74.180.000		76.020.000		77.890.000		

	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	12	12	70.000.000	12	72.374.000	12	74.180.000	12	76.020.000	12	77.890.000		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				70.000.000		72.374.000		74.180.000		76.020.000		77.890.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	12	12	70.000.000	12	72.374.000	12	74.180.000	12	76.020.000	12	77.890.000		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Milyar Rupiah	8.488,02	9.127,77	9.539,58	10.102,34	10.831,19	11.507,64	12.194,47	
3.	Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	544	545	546	547	548	549	550	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,1	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,06	
5	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN
AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Realisasi Total terhadap Target Investasi		Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	positif	%	-38,4	0,059	0,06	0,061	0,062	0,063	0,064	

